**DAMPAK POLITIK KOLONIAL BELANDA TERHADAP KEKUASAAN SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN DI DOMPU**

**PADA TAHUN 1886-1934 \***

**(The Political impact of Dutch colonial Toward the Power of Sultan Muhammad Sirajuddin in Dompu in 1886-1934)**

**Husnul Khatimah[[1]](#footnote-2)\*\***

**ABSTRAK**

Politik Kolonial yang dijalankan oleh pemerintah Belanda memiliki peranan penting dalam mempertahankan daerah-daerah jajahannya di Nusantara termasuk daerah Kesultanan Dompu yang berada dibawah pimpinan Sultan Muhammad Sirajuddin. Oleh karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) bagaimana sistim pemerintahan Kesultanan Dompu pada periode sebelum dan pada masa Pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin? (ii) bagaimana sisitim politik Kolonial Belanda di Kesultanan Dompu? (iii) bagaimana dampak sistim politik Kolonial Belanda terhadap kekusaan Kesultanan Muhammad Sirajuddin?

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk menelusuri dan mengungkapkan (i) sistim pemerintahan di daerah Dompu pada masa Kesultanan Muhammad Sirajuddin pada tahun 1886-1934; (ii) untuk mengetahui kebijakan Politik Kolonial Belanda terhadap sistim Pemerintahan Kesultanan Muhammad Sirajuddin; (iii) untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh sisitim Politik Kolonial Belanda terhadap kekuasaan Kesultanan Muhammad Sirajuddin 1886-1934.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa (i) pada masa Pemerintahan Kesultanan Muhammad Sirajuddin sudah memiliki susunan organisasi pemerintahan mulai dari ditingkat pusat sampai di daerah bawahan.; (ii) adapun sistim Politik Kolonial Belanda pada masa itu adalah, Kontrak Panjang, pembangunan kantor Asisten Residen, Kolonial Belanda memanfaatkan Sultan Salahuddin Bima; (iii) Kolonial menggunakan taktik balas jasa, Kolonial Belanda menggunakan taktik adu domba.

Kata Kunci: Politik, Kolonial Belanda, Kekuasaan

**ABSTRACT**

Political Colony by Belanda government has the important character in mountain the colony areas in the archipelago include Dompu Sultanate area which was leaded by Sultan Muhammad Sirajuddin. The political was done as force desire government Colonial to ward sultan and Dompu society especially for Sultan Muhammad Sirajuddin to weaken Sultan power in Dompu government.

The objective of this research is Dutch Political Colony toward sultanate government of Dompu. The problem statement of this research is the form of Dutch Political Colony toward the power of Sultan Muhammad Sirajuddin 1886-1934. The approachment that used is qualitative approach with history research. This research using interview and documentation as object knowledge.

The conclution of this research is Sultan Muhammad Sirajuddin as soultanate of Dompu was very brave to resist and affront the dutch colonial so that society always looking for weaknes of sultan, the effront that dutch colonial doing was always fail until deutch colonial isolate and make sultan Muhammad sirajuddin as a political resistence as this whole life to kupang by jugmentnumber 17 1934 for weaken and break the dompu’s sultanate dynasty. Sultan was dead 1937 in the isolate place

Keyword: Political , Colonial , Power

**PENDAHULUAN**

Keberadaan Dompu pada masa lalu sebagai sebuah Kerajaan di Pulau Sumbawa berusaha dilacak dan diungkapkan dari berbagai sumber sejarah, salah satu upaya dilakukan pemerintah dan masyarakat Dompu adalah meninjau secara langsung tempat-tempat yang dianggap merupakan peninggalan sejarah kebudayaan di masa pemerintahan Belanda.

Ekspansi Pemerintah Kolonial Belanda sejak abad ke-19 di Nusantara sebagai pemegang hegemoni politik di Nusantara melahirkan penderitaan yang cukup panjang di seluruh wilayah Nusantara termasuk juga di Kerajaan Dompu. Kendati usaha-usaha Belanda dalam memainkan monopoli perdagangan dan politik kolonialnya mendapatkan perlawanan oleh penguasa pribumi, namun selalu dapat diredam oleh Belanda karena perlawanan yang dilakukan masih bersifat tradisonal. Begitu juga yang terjadi di Pulau Sumbawa khususnya di wilayah Kesultanan Dompu pada saat itu. Pertentangan antara Pemerintah Kolonial Belanda dengan penguasa pribumi semakin memanas, Dompu lebih-lebih setelah semua penguasa kerajaan di Pulau Sumbawa menandatangani kontrak panjang (*lange contract*), termasuk Kesultanan Dompu hingga di bawah Pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin, Belanda terus menggerogoti Dompu. Semula kepentingan Belanda datang ke Nusantara terbatas pada kepentingan perdagangan namun pada akhirnya mengutamakan kepentingan kolonial untuk mendapatkan keuntungan yang berlimpah dari Indonesia. Dalam pemahaman ini, politik Belanda dijalankan dengan cara yang kurang baik atau sedikit keluar dari maknanya, karena usaha untuk memperoleh dan mempertahankannya sering dilaksanakan dengan cara yang ilegal bahkan tidak bermoral seperti yang dilakukan oleh Belanda terhadap masyarakat Dompu yaitu terutama sekali pada Sultan Muhammad Sirajuddin.

Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan tokoh tauladan yang patut dicontoh oleh generasi sekarang. Ketika itu penguasa adalah sebuah lambang feodalisme namun Sultan sebaliknya tampil menjadi pemimpin yang kharismatik ini harus terhenti dengan diasingkan oleh pemerintah Kolonial Belanda agar jauh dari tanah leluhurnya. Ia akhirnya diasingkan ke Kupang bersama keluarganya oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian sejarah Dompu yang tertutama sekali saat dipimpin oleh Sultan Muhammad Sirajuddin dalam menentang dominasi Belanda pada sistim pemerintahan yang berusaha melemahkan kekuasaannya. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini ada beberapa kendala yang begitu berat seperti yang telah diungkapkan di atas. Walaupun demikian peristiwa sejarah memiliki keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya, yang sangatlah dapat membantu dalam mengungkapkan peristiwa sejarah perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin yaitu: Terutama dalam melawan penjajahan Kolonial Belanda yang senantiasa dengan kejam melakukan penaklukan dan penjajahan di daerah Dompu.

Berdasarkan Latar belakang dan batasan masalah di atas peneliti mengajukan rumusan masalah meliputi, (1) Bagaimana sistem Pemerintahan Kesultanan Dompu pada periode sebelum, dan pada masa Pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin? (2) Bagaimana sistem politik Kolonial Belanda di Kesultanan Dompu? (3) Bagaimana dampak dari sistem Politik Pemerintahan Kolonial Belanda terhadap kekuasaan Sultan Muhammad Sirajuddin? Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri dan mengungkapkan sistem pemerintahan di daerah Dompu pada masa Kesultanan Muhammad Sirajuddin pada tahun 1886-1934. (2) Kebijakan politik Kolonial Belanda terhadap sistem pemerintahan Kesultanan Muhammad Sirajuddin. (2) Dampak yang ditimbulkan oleh sistem politik Kolonial Belanda terhadap Kekuasaan Kesultanan Muhammad Sirajuddin 1886-1934.

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan, pada bagian ini akan diuraikan beberapa konsep yang relevan dengan topik penelitian: sesuai dengan judul penelitian yang diteliti oleh peneliti yaitu "Dampak Politik Kolonial Belanda terhadap Kekuasaan Sultan Muhammad Sirajuddin di Dompu Pada Tahun l886-1934".

Surbakti, (1992: 10-11) politik yaitu interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Politik dalam bentuknya yang paling baik adalah usaha untuk mencapai satu peraturan sosial yang baik dan adil, dan politik dalam bentuknya yang paling buruk adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingandiri sendiri). Seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia.

Kedatangan Belanda di Indonesia pada mulanya bertujuan mencari rempah-rempah yang merupakan komoditi unggulan yang sangat laku di pasaran Eropa pada saat itu. Orang Belanda yang pertama kali tiba di Kepulauan Nusantara adalah *Cornelius de Houtman* tepatnya di Banten pada tahun 1595. Pada awalnya kedatangan Belanda disambut baik oleh bangsa Indonesia pada saat itu karena beberapa alasan diantaranya: (1) Belanda datang dengan tujuan untuk berdagang; (2) karena Belanda merupakan musuh Portugis; Portugis adalah Bangsa Eropa yang lebih dahulu datang ke Indonesia sebelum Belanda. Sifatnya (Portugis) yang sombong membuat penduduk pribumi (Bangsa Indonesia) tidak senang dengan bangsa Portugis. Hal ini lah yang membuat Belanda dapat diterima dengan baik oleh penduduk pribumi pada awal kedatangannya.Namun hal itu semuanya berubah setelah mereka memperlihatkan sifat aslinya. Pertentangan demi pertentangan pun terjadi antara Belanda bahkan berujung pada peperangan yang besar.

Adapun beberapa kebijakan politik pemerintah Kolonial Belanda dan sistem birokrasi pemerintah di Indonesia yang semakin menyengsarakan penduduk pribumi. Dwifernindi, (2012: 6) mengungkapkan peraturan-peraturan yang ditetapkan Pemerintah Kolonial Belanda dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain:

1. *Verplichte Leverantie* yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditetapkan oleh Belanda dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada bangsa asing lainnya.
2. *Contingenten Stelsel* yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi.
3. Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.
4. Ekstirpasi yaitu hak Pemerintah Kolonial Belanda untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi over produksi yang dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.
5. Pelayaran Hongi yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan Pemerintah Kolonial Belanda dan menindak pelanggarnya.
6. Sistem Birokrasi Belanda. Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara Pemerintah Kolonial Belanda mengangkat seorang *gubernur jenderal* yang dibantu oleh 4 orang anggota Dewan Indie (*Raad van Indie.*

Kolonial Belanda mencoba untuk menjalankan "Politik Etis".dengan alasan untuk mengangkat derajat penduduk pribumi namun kegagalan pada kenyataan politik hanya memberi keuntungan besar bagi Belanda. Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik. Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat, sehingga dominasi Belanda tetap sangat besar.

Mariam Budiardjo mendefinisikan kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku (Rhohdiastuti, 2003: 5).

Sebenarnya kekuasaan itu adalah kewenangan yang diperoleh seseorang atau kelompok dari kedudukan, kecakapan, warisan atau rampasan (paksaan). Seperti yang dilakukan oleh Kolonial Belanda di Indonesia yaitu menjajah bangsa ini. Itu adalah salah satu contoh kekuasaan yang didapatkan lewat cara paksaan (rampasan). Sedangkan contoh yang lain kekuasaan yang didapatkan dengan mudah warisan yaitu kekuasaan seorang raja atau sultan.

Pemerintah pertama yang menggunakan gelaran 'Sultan' ialah ketua Turkmen, Mahmud dari Ghazni, yang memerintah antara tahun 998 -1030. Gelaran 'Sultan’ kemudian menjadi gelaran yang biasa untuk pemerintah- pemerintah Turki Seljuk dan Turki Utsmaniyyah serta pemerintah-pemerintah Ayubid dan Mamluk di Mesir, (Alih Mudah, 2013; 3).

Gelar sultan dan raja pada hakikatnya memiliki makna yang sama yaitu pemerintah yang tertingi dalam suatu kerajaan atau kesultanan. Gelar sultan di Indonesia digunakan oleh pemimpin-pemimpin kerajaan setelah mendapat pengaruh Islam yang cukup hebat. Gelar sultan identik dengan Islamnya, sedangkan gelar raja sangat identik dengan pengaruh agama Hindu-Budhanya.

Kerajaan Dompu terletak di bagian tengah Pulau Sumbawa. Kerajaan Dompu berbatasan dengan Kerajaan Sumbawa dan Teluk Saleh di bagian barat, Kerajaan Bima di utara dan timur, serta Samudera Hindia di selatan, (Ismail dan Malingi, 2008: 8). Bahwa lebih kurang lima ratus hingga dua ratus tahun lalu, pernah berjaya kerajaan yang cukup disegani di wilayah Sunda Kecil, yaitu Kerajaan Dompu.

Kerajaan Dompu adalah salah satu kerajaan di bagian timur Nusantara, bahkan menurut arkeolog dari Pusat Balai Penelitian Arkeologi dan Purbakala dinyatakan sebagai kerajaan di timur Nusantara, (Noval, 2011: 4). Dompu pada mulanya terdapat kelompok-kelompok suku yang disebut dengan Ncuhi.Terdapat empat Ncuhi, yakni:

1. Ncuhi Hu’u yang mempunyai wilayah kekuasaan di daerah Hu’u, kecamatan Hu’u pada saat ini dan berbatasan dengan Kecamatan pajo
2. Ncuhi Saneo yang mempunyai wilayah kekuasaan di daerah Saneo dan sekitarnya dan berada di Kecamatan Dompu
3. Ncuhi Nowa yang mempunyai wilayah kekuasaan di daerah Nowa dan sekitarnya dan berbatasan dengan kecamatan Kecamatan Woja
4. Ncuhi Tonda yang mempunyai wilayah kekuasaan di daerah Tonda dan sekitarnya berbatasan dengan Kabupaten Dompu

Di antara keempat Ncuhi ini yang terkemuka adalah Ncuhi Hu’u. Menurut cerita rakyat, di negeri Woja berkuasa seorang Ncuhi bernama sang Kula yang mempunyai seorang putri bernama Kombe Rame. Ncuhi ini kemudian terkenal dengan nama Ncuhi Patakula. Pada saat itu terdamparlah putra Raja Tulang Bawang di daerah Woja yang sengaja mengembara di daerah bagian timur, kemudian putra raja tulang bawang dinikahkan dengan putri Kombe Rame. Atas kesepakatan semua Ncuhi, sang pangeran itu kemudian diangkat sebagai raja pertama kerajaan Dompu. (Depdikbud Nusa Tenggara Barat, 1988:21-22).

Jejak peninggalan kerajaan Dompu masih bisa ditelusuri hingga awal abad ke sembilanbelas, meski saat itu sudah dipecah-belah Belanda akibat raja yang memerintah lemah. Akhirnya, bersama Kerajaan Tambora, Kerajaan Sanggar dan Kerajaan Pekat, semua Kerajaan di Sumbawa diduga musnah bersamaan, terkubur bersama tak kurang dari 71.000 jiwa, korban amukan dahsyatnya letusan Gunung Tambora, (Noval,2011:6).

Muhammad Sirajuddin merupakan putra dari Sultan Abdullah (Sultan Dompu yang ke-19) dilahirkan di Dompu pada tahun 1848. Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan Dompu pada tanggal 21 Oktober 1886 (Suryanto dan Rahmi, 2003: 38). Beliau wafat di Kupang (Kampung Air Mata) tanggal 14 Februari 1937 dalam pengasingan Pemerintah Kolonial Belanda. Beliau adalah merupakan Sultan Dompu yang ke-20 bergelar Sultan Manuru Kupang.

Suryanto, (2003) juga pernah menulis tentang “ Kembalinya Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kupang NTT ke Kabupaten Dompu NTB” yang isinya membahas riwayat hidup singkat Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin (Manuru Kupang). Sultan Muhammad Sirajuddin dilahirkan di Dompu pada tahun 1848 M, dan wafat dalam pengasingan Pemerintahan Kolonial belanda, tepatnya di Kupang (Kampung Air Mata) pada tanggal 14 februari tahun 1937 dalam usia 89 tahun. Beliau adalah merupakan sultan Dompu yang ke 20 dan bergelar Sultan Manuru Kupang. Almarhum merupakan putra dari Sultan Abdullah (Sultan Dompu ke 19). Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin dilantik menjadi Sultan pada tanggal 21 Oktober 1886.

Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan Dompu pada tanggal 21 Oktober 1886 dan merupakan Sultan Dompu yang paling lama berkuasa dan memangku jabatan sebagai Sultan yakni selama 48 tahun (1886-1934). Almarhum sangat keras menentang kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda seperti tertuang dalam Kontrak Panjang (*Lange Contract).*

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Penelitian sejarah adalah proses mengkaji secara sistematis suatu peristiwa masa lalu dalam rangka mendapatkan pengetahuan dan pemahaman baru yang lebih mendalam serta makna dari peristiwa yang diteliti. Menurut Kuntowijoyo, ada lima tahap dalam penelitian sejarah, yaitu: pemilihan topik, pengumpulan data (heuristik), verifikasi, interpretasi, dan penulisan (historiografi).

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara penelitian arsip dan penelitian pustaka serta wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat dan budayawan yang mengetahui peristiwa tersebut. Oleh karena itu penulis berusaha mengungkap data tentang perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin di Kabupaten Dompu, melalui tiga cara penelitian tersebut yakni penelitian arsip, penelitian pustaka dan wawancara. Penelitian arsip di pusatkan di arsip perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan penelitian pustaka dilakukan di berbagai lokasi, di mana ada lembaga perpustakaan yang diperkirakan menyimpan sumber sejarah tentang Kerajaan Dompu.

Lokasi penelitian untuk kegiatan wawancara adalah Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang merupakan basis atau lokasi perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin sesuai dengan tanah kelahiran Beliau.

Metode pengumpulan data dalam metode sejarah disebut dengan heuristik. (Sjamsuddin 2007:86). Heuristik atau dalam bahasa jerman *Quellenkunde* adalah sebuah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data atau materi sejarah atau evidensi sejarah, sehubungan dengan pencarian dan pengumpulan sumber-sumber. Metode analisis data menggunakan kritik sumber dan interpretasi.

**HASIL PENELITIAN**

Penelitian ini adalah bekas kerajaan Dompu yang kini telah berkedudukan di Kabupaten Dompu. Lokasi kegiatan penelitian berada di Kecamatan Dompu dikarenakan lokasi bekas istana Dompu berada di Kecamatan Dompu yang sekarang sudah didirikan Masjid Raya. Mata pencaharian penduduk kabupaten Dompu sebagian besar adalah petani 80%, sedangkan mata pencaharian lainnya 20% seperti nelayan, peternak, pedagang, pegawai negeri sipil, dan ABRI.

**Asal Mula Kesultanan Dompu**

Wilayah Tingkat II Dompu sekarang ini dulunya adalah bekas wilayah kerajaan atau kesultanan. Status daerah kabupaten yang diperolehnya justru karena nilai historis yang dimilikinya sebagai wilayah kerajaan atau kesultanan yang telah berdiri sejak lama dengan jumlah raja atau sultan yang telah memerintah sebanyak 29 orang.

Mulai membentuk dirinya dalam kehidupan berpemerintahan sendiri, semenjak adanya pemukiman di daerah ini masyarakatnya telah menata dirinya dalam kehidupan berpemerintahan misalnya:

Awal kehidupan berpemerintahan di daerah Dompu bercorak klen yang disebut Ncuhi, yaitu suatu persekutuan hidup kemasyarakatan yang kecil yang di kepalai oleh Ncuhi atau kepala suku. Dalam persekutuan masyarakat seperti ini belum ada nama kampong atau desa dan marga seperti sekarang ini, akan tetapi sebutan “Nggaro”(kebun) di Dompu dan “Lewi” di Bima itulah nama tempat pemukiman buat mereka di periode-periode berikutnya ialah pengelompokan kehidupan dalam bentuk yang lebih besar lagi dengan wilayah yang lebih luas. Persekutuan hidup kemasyarakatan seperti ini dipimpin oleh seorang raja.

Dalam uraian kapan mula berdirinya wilayah Kerajaan Dompu ini atau Negara kecil yang berdaulat penuh dan berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri, maka akan dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian besar di dalam sejarah tanah air atau sejarah nasional kita tentang identitas yang dimilikinya misal: Sejarah tentang berdirinya Kerajaan Sriwijaya di Sumatra sebagai kerajaan pertama di Indonesia sekitar tahun 700 sampai 900 menurut catatan dalam buku Atlas sejarah, negeri Dompu ini sudah ada.

Dalam meliput tentang risalah Kerajaan Dompu, selama berdirinya kerajaan ini mengenal dua istilah yang diberikan kepada tampuk pimpinan pemerintahan negeri yaitu pada zaman Hindu atau animisme pimpinan pemerintahan negeri disebut dengan istilah raja dan pada zaman setelah zaman raja dan rakyatnya menganut agama Islam, pimpinan pemerintahan negeri disebut dengan istilah sultan.

Sebutan raja atau sultan ini menurut kebiasaan anak Negeri Dompu adalah sama dengan sangaji atau *hawo ra ninu* (menaungi dan melindungi) Sebutan ini mengingatkan lambang kehadiran raja yang berasal dari sang jin bagi sangaji dan *hawo ra ninu* sebagai lambang pemerintahan yang menaungi dan melindungi rakyat. Pimpinan pemerintahan yang disebut raja sejumlah 8 orang sedangkan yang disebut dengan sultan berjumlah 21 orang sehingga jumlah seluruhnya 29 orang.

Sebagai satu negeri yang telah lama ada, maka negeri ini telah memiliki sistim pemerintahan yang teratur dan rapi. Pemerintahan negeri ini dijalankan atas dasar peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis (konvensi) peraturan yang tidak tertulis disebut hukum adat. Kemudian setelah agama Islam berkembang dan menjadi anutan raja dan seluruh anak negeri maka urusan pemerintahan diatur berdasarkan syariat agama Islam. Sistim pemerintahan yang dulunya berdasarkan hukum adat, kemudian diganti dengan sebutan pemerintahan yang berdasarkan Hadat dan Hukum.

Sesuai dengan pembagian wilayah pemerintahan dan daerah bawahan, maka sampai di tingkat terendah pun telah diatur aparat pelaksana pemerintahan sesuai dengan tingkat wilayahnya masing-masing yang kesemuanya adalah dari aparat pemerintah yang terdiri dari hadat dan hukum.



*Sultan Muhammad Sirajuddin beserta jajaran Pemerintahannya 1886*

*Sumber: Foto Pemberian oleh H. Yusuf Jamaluddin, BA diberikan pada penulis tahun 2015*

Melihat susunan organisasi pemerintahan seperti diuraikan di atas, maka sejak dulu negeri ini sudah mempunyai susunan organisasi pemerintahan yang sempurna teratur rapi dengan susunan perangkat aparatur yang lengkap mulai di tingkat pusat pemerintahan sampai ketingkat wilayah terendah.

Sultan Muhammad Sirajuddin pernah dihadiahkan oleh pemerintah Kolonial Belanda sebuah bintang kehormatan kerajaan Belanda (Willem Van Orange Nassau). Ketika menduduki Dompu tahun 1927 dan Sultan mengembalikan bintang tersebut kepada Residen Timor di kupang pada februari 1934 karena beliau merasa telah ditipu oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan mengasingkan seumur hidup berdasarkan besluit No.11 tahun 1934.

Bahwa akibat penentangan beliau terjadi ketegangan terus menerus dengan penjajah, sehingga beberapa kali hampir terjadi perang total antara pihak Kesultanan Dompu dengan Pemerintah Hindia Belanda. Namun demikian sempat beliau mendorong rakyat di Manggelewa, Soriutu bergolak sekitar tahun 1907 hanya saja karena minimnya persejataan, pemberontakan mereka berhasil direndam oleh pemerintah Kolonial Belanda (M Hilir, 2004).

Perlawanan beliau terhadap kebijakan politik Kolonial Belanda lebih didorong oleh konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi, tidak mau diatur oleh kekuasaan asing yang datang dari luar yang bertujuan hanya untuk keuntungan pihak penjajah.

Selain perjuangan beliau secara konsisten tanpa pernah menyerah selama pemerintahannya, sampai akhirnya dibuang ke Kupang. Sultan Muhammad Sirajuddin juga berjasa menghapus perbudakan di Dompu. Sehingga strata masyarakat keempat Dompu pada jaman beliau berkuasa yang disebut sebagai strata “dou ada”(Kaum budak) tidak ada lagi.

Untuk memberikan gambaran tentang hal itu lebih jelas lagi terutama tentang nama-nama jabatan atau pangkat di wilayah daerah bawahan, dapat diketahui dengan susunan nama-nama jabatan atau pangkat seperti diuraikan dibawah ini. Khusus mengenai kepangkatan hukum jabatan qadhi mana kala di dalam negeri tidak ada yang bicara arif dan bijakasana maka jabatan itu dapat dipangku dan dirangkap oleh raja atau sultan karena kedudukan dan tanggung jawabnya di dalam meletakkan hukum pada publik adalah tanggung jawab yang besar, mengingat fungsi raja atau Sultan sebagai *hawo ra ninu* atau sebagai pengayom dan pelindung masyarakat yang harus diletakkan pada proporsinya.

Hal ini membuktikan beliau sangat konsekuen dengan perbaikan hak-hak asasi manusia, selama di Dompu beliau membangun peradaban kehidupan yang memberikan rasa aman, nyaman, adil, dan sejahtera bagi rakyat Dompu. Sultan menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam sehingga tidaklah mengherankan beliau dipercaya memerintah paling lama dibandingkan seluruh raja atau sultan yang pernah memimpin Dompu yaitu selama 52 tahun, beliau memimpin dengan filosofi Nggusu Waru delapan prinsip kepemimpinan (Abdul Malik 2008)

*1.Yang taat kepada Allah dan Rasul( Mato’a di Ruma labo Rasu) 2.Yang pintar dan berpengetahuan (Maloa Ra Bade) 3.Yang lurus menjalankan pemerintahan (Mantiri Nggahi Ra Kalampa) 4.Yang bijak dalam menyelesaikan masalah( Mapoda Nggahi Paresa) 5.Gagah berani (Mambani ro Disa)6. Mampu memimpin (Matenggo ro Wale)7. Berwibawa (Madisa ra Sune) 8. Dari keturunan yang baik( Londo Dou Mataho.*

Kesultanan Dompu mengalami zaman penjajahan Belanda diperkirakan hampir selama tiga abad (sekitar 270 tahun). Hal itu berawal ketika Dompu ditaklukan oleh kerajaan kembar Gowa-Tallo (Makassar) pada sekitar tahun 1618 atau pada saat masa Pemerintahan Raja Gowa ke-14 yakni Sultan Alauddin. Selanjutnya sekitar abad ke 17 atau pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (Raja/Sultan Gowa) menandatangani perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 dengan Spelman (Belanda), maka Dompu yang saat itu menjadi bagian dari kekuasaan wilayah kerajaan Goa secara otomatis masuk dalam wilayah jajahan pemerintah Kolonial Belanda.

Sekitar tahun 1920 kolonial Belanda dipermalukan kembali oleh Sultan Muhammad Sirajuddin tentang isi kontrak, agar kesetiaannya terbukti, Belanda meminta Sultan Muhammad Sirajuddin memberikan sebidang tanah untuk lokasi pembangunan kantor Wakil Asisten Belanda atau Controller Hoofd van Platsehelijke Bestuur (HPB), (Pangeran Moh.Kisman, 2013:16). Keberadaan kantor perwakilan Belanda ini akan menjadikan Dompu kemudian sebagai kota Gemeente (semacam Kota administrative) seperti Raba di Bima dan Sumbawa sehingga dapat mempermudah kolonial Belanda mengawasi ruang gerak sultan. Sebagai jawaban atas permintaan Kolonial Belanda, Sultan Muhammad Sirajuddin hanya memberikan Asisten Residen yang berkedudukan di Raba tanah hanya sebanyak satu Tempurung kelapa, (tutur H.M.Yusuf Jamaluddin).

Kolonial Belanda cepat membaca keadaan di Kesultanan Dompu, dengan cepat mengubah politiknya. Sekitar tanggal 4 September 1934, dua komisaris Polisi Belanda diutus *Asisten Residen Karl Tahoosz* yang berkedudukan di Raba, menuju Dompu, mengundang sultan dan kedua putranya berunding dengan Residen yang tiba di Raba dari Kupang, mengenai hubungan kedua belah pihak. Sejalan dengan kemajuan yang dicapai manusia di dalam membentuk dirinya sebagai makhluk budaya, bahasapun ikut menata dirinya lebih sempurna lagi sehingga enak dipakai, manis diucapkan, sedap di dengar, dan membuat pemakainya menjadi mulia.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu negeri yang telah ada, maka negeri ini telah memiliki sistim pemerintahan yang teratur dan tersusun rapi, pemerintahan di Kesultanan Dompu dijalankan atas dasar peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian setelah agama Islam berkembang dan menjadi anutan raja dan seluruh anak negeri maka urusan pemerintahan diatur berdasarkan syariat agama Islam. Sistim pemerintahan yang dulunya berdasarkan hukum adat kemudian diganti dengan sebutan pemerintahan yang berdasarkan hadat dan hukum. Sesuai dengan pembagian wilayah pemerintahan dan daerah bawahan, maka sampai ditingkat wilayahnya masing-masing yang kesemuanya adalah dari aparat pemerintah. Mereka menjalankan urusan pemerintah di wilayah atas nama raja atau sultan sehingga mereka bertanggung jawab masing-masing segala urusan pemerintahan yang dibebankan di atas pundak mereka dan di samping itu agar komunikasi antara bawahan dengan atasan terbina dengan baik dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dapat dilakukan secara efektif.
2. Sultan Muhammad Sirajuddin adalah Sultan Dompu yang paling berani membangkang terhadap kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. Oleh karenanya sultan selalu dicarikan titik lemahnya oleh Kolonial Belanda supaya sultan dapat dijadikan boneka yang selalu tunduk dan patuh kepada setiap kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda. Usaha dan taktik (politik) yang dilakukan oleh Kolonial Belanda dalam melemahkan kekuasaan Sultan Muhammad Sirajuddin mulai dari diikat Kontrak yang wajib dipatuhi oleh sultan, mengadu domba keluarga Sultan Muhammad Sirajuddin yaitu Abdul Wahab dan Abdullah, sampai dengan ditawarkan sebuah istana permanen dari semen beton namun Sultan Muhammad Sirajuddin tidak tergiur dengan semua bujuk rayu dan tetap membangkang. Akhirnya Kolonial Belanda menjalankan tipu muslihatnya dengan mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin seumur hidupnya ke Kupang berdasarkan Besluit No.11 tahun 1934 hingga sultan wafat di tempat pengasingannya pada tanggal 14 februari 1937.
3. Dampak yang ditimbulkan dari adanya sistim politik Kolonial Belanda di Kesultanan Dompu di bidang politik, akibat dari itu Sultan Muhammad Sirajuddin dan kedua putranya diasingkan ke Kupang, sehingga kekuatan Kesultanan Dompu menjadi lumpuh dan Kesultanan Dompu digabung dengan kesultanan Bima sehingga pada masa penggabungan Kesultanan Dompu masuk ke wilayah kesultanan Bima banyak penduduk Bima bermigrasi ke wilayah Dompu secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan sosial seperti sawah-sawah di daerah Dompu banyak dikuasai oleh warga Bima yang bermukin di wilayah Kesultanan Dompu, dan kebudayaan Bima mempengaruhi di bidang bahasa dan lain sebagainya.

**DAFTAR RUJUKAN**

Alih mudah. Diposting 19 juli 2013. *Sultan Muhammad Sirajuddin* (Online).

Dinas Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Barat. 1988. *Sejarah Nusa Tenggara Barat.* Mataram.

Dwifernind, Monday, November 19, 2012. *Kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia pada Abad ke-19 dan 20* (Online), [http://oktadwifernindi.blogsopt.com/2012/11/kebijakan-pemerintah-kolonial-belanda.html. Diakses 20 juli 2013](http://oktadwifernindi.blogsopt.com/2012/11/kebijakan-pemerintah-kolonial-belanda.html.%20Diakses%2020%20juli%202013)

Ismail, M Hilir dan Malingi, Alan. 2010. *Sultan Moehammad Tadjuoel Arifin Sirajuddin.* Mahani Persada : Mataram

Noval. 2011. *Jejak Sejarah Dompu* (Online), (<http://lintasmbojo.com/> 2011/03/jejaksejarah-daerah-dompu.html.Diakses 19 juli 2013 )

Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: Ombak

Soerianto, H.RM. Agoes. 2008. *Sangaji Manuru Kupa Dalam Kenangan.* Pemda Kabupaten Dompu.

1. \* Penelitian ini Dilakukan sebagai Syarat untuk Mencapai Derajat Magister di Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar.

   \*\* Mahasiswa Pascasarjana Universitas Negeri Makassar Jurusan Pendidikan Sejarah [↑](#footnote-ref-2)